

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Banyumas suasana politik semakin hangat. Banyak yang mempromosikan calonnya dengan berbagai cara yang sekiranya bisa menarik masyarakat untuk memilih calonnya, calon pasangan kepala daerah untuk Wilayah Kabupaten Banyumas sebelumnya belum pernah mencapai enam pasangan calon bupati dan wakil, banyak yang membicarakan calon legislatif dari berbagai masyarakat, para agen politik, agen sosialisasi politik mulai bergerak demi memperoleh hasil yang maksimal untuk para calon legis latif yang mereka dukung, berbagai cara sosialisasi dilakukan demi memperoleh dukungan dari masyarakat, tak ketinggalan pula di sekolah, di sekolah bisa saja menjadi target para agen sosialisasi pilkada karena di sekolah lanjutan (SMA/SMK) terdapat calon pemilih pemula.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung memberikan indikasi bahwa kualitas demokrasi di Negara Indonesia semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kadar demokrasi suatu Negara ditentukan antara lainnya oleh besarnya partisipasi politik masyarakat dalam menentukan siapa dari mereka yang dijadikan pejabat politik. Semakin banyak pejabat politik pada level nasional atau daerah yang

dipilih secara langsung oleh rakyat, maka semakin tinggi kadar demokrasi Negara tersebut, karena minimal masyarakat sudah terlibat aktif dengan memberikan suaranya secara langsung "one man one vote" kepada calon pemimpin mereka nantinya.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya hampir sama dengan pemilihan anggota DPRD. Hal tersebut tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil"

Melalui pemilu para kader politik atau agen-agen politik mulai berlomba lomba untuk memberikan pengetahuan politik atau pendidikan politik kepada masyarakat pada umumnya yang tujuannya tidak lain adalah untuk menarik simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam situasi ini pendidikan politik sangat penting dilakukan apa lagi pada saat menjelang pemilu kegiatan-kegiatan politik sangat gencar dilakukan oleh para agen politik, tidak hanya di masyarakat,

di sekolah bisa saja menjadi target para agen sosialisasi politik untuk mendulang suara.

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen sosialisasi politik, agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff, (2005:9) menggariskan terdapatnya lima agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu keluarga, sekolah, *peer groups*, media massa, pemerintah, partai politik, berdasarkan pendapat tersebut maka tidak menutup kemungkinan sekolah bisa saja menjadi target para agen sosialisasi politik untuk memanfaatkan situasi demi kelancaran pelaksanaan sosialisasi politik.

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan-pendidikan khusus yang tidak diperoleh dalam keluarga. Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak mengenai pentingnya hidup bernegara, rasa cinta tanah air dan rasa setia kepada Negara, juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang Negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana siswa diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah.

Sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga Negara yang memiliki komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya

yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga Negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*).

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sekolah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

Menurut Branson (1999:8) bahwa tujuan dari *Civic Education* atau Pendidikan Kewarganegaraan adalah :

Partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan (1) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional Amerika.

Branson mengemukakan bahwa tujuan dari adanya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan sikap partisipasi warganegara dalam kehidupan demokrasi. Sehingga warga Negara

memiliki kemampuan untuk menjadi pemain atau aktor baik dalam tataran lokal maupun nasional.

Konsep-konsep politik yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki misi untuk membina siswa agar paham politik, dalam artian siswa tahu dan paham, mengerti, menyadari, meyakini, dan menegakkan atau melaksanakan segala apa yang ia ketahui dari pembelajaran. Selain itu, melalui pemahaman konsep-konsep politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan siswa dapat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta sadar atas hak dan kewajibannya.

SMA Negeri Sokaraja sebagai salah satu agen sosialisasi politik memiliki andil yang besar dalam pendidikan politik yang diharapkan dapat mendidik siswa menjadi warga Negara yang baik, dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas dan rasional. Semenjak kelas X sampai kelas XII mereka sudah mendapatkan pembelajaran politik melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran politik yang cerdas, rasional dan santun akan membawa perilaku siswa dalam memahami politik dan menggunakan kecerdasannya untuk menggunakan hak politiknya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengungkap bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di sekolah terkait dengan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten banyumas. Dasar pemikiran inilah yang menjadikan motivasi peneliti untuk mengungkap kondisi faktual yang terjadi, sehingga mengambil judul penelitian tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah (Studi

deskriptif analisis terhadap siswa SMA Negeri 1 Sokaraja menjelang pemilihan Kepala daerah Kab. Banyumas)

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka secara umum dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah terhadap Siswa SMA Negeri Sokaraja menjelang pemilihan Kepala daerah Kabupaten Banyumas”

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis membatasi penelitian dalam beberapa sub masalah berikut:

1. Bagaimanakah peran Sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Politik menjelang pemilihan Kepala Daerah.
2. Apa saja hambatan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah.
3. Usaha-usaha mengatasi hambatan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi uraian tentang rumusan hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa selaku peneliti yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Tujuan yang berkait erat dengan permasalahan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan politik di sekolah terhadap siswa menjelang pilkada Kabupaten Banyumas.

Kemudian untuk lebih spesifiknya peneliti membagi tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui peran sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Politik menjelang pemilihan Kepala Daerah
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah
3. Mengetahui usaha-usaha mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti khususnya dan berbagai pihak, serta memberikan gambaran secara lengkap mengenai pendidikan politik di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan peneliti.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi sekolah sebagai penyempurna dalam pelaksanaan pendidikan

politik dan menjadi cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

c. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan pelaksanaan Pendidikan Politik siswa SMA Negeri Sokaraja

